



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 9326-9342

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Pemerintah India Mengatasi Tradisi Dowry tahun 2015-2020

Feni Cikita^{1✉}, Yusnarida Eka Nizmi², Yessi Olyvia³

Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: fenicikita19@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan kelainan individu melainkan karena adanya kesenjangan hak dan kewajiban serta peran laki laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Masyarakat di India masih hidup di bawah patriarki, yang artinya mereka selalu mendahulukan hak-hak pria dibandingkan wanita. Perempuan dalam masyarakat modern dan masyarakat tradisional, sangat rentan terhadap kekerasan baik yang bersifat kriminal maupun yang bersumber dari tradisi, praktik budaya tradisional India yang terkenal ini salah satunya adalah sistem *dowry* atau mahar. Yaitu dimana pihak pengantin perempuan dalam suatu tradisi pernikahan di India akan memberikan sejumlah *dowry* kepada pihak pengantin laki-laki. *Dowry* diibaratkan sebagai simbol pendatang karena pengantin perempuan akan menjadi anggota keluarga baru di keluarga suaminya. Permintaan *dowry* tidak kunjung terpenuhi mendorong terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori feminisme liberal dan teori gender dalam hubungan internasional. Konsep teori feminisme liberal untuk menjelaskan bahwa perempuan dan pria itu diciptakan sama, dan memiliki hak dan kesempatan yang sama pula. Yang artinya, perempuan memilih kebebasan secara penuh dan individual. Dalam hal ini feminisme liberal memandang dalam kasus *dowry murder* tindakan pelanggaran HAM pada wanita tidak dapat ditolerir, karena nilai budaya *dowry* dijadikan suatu kebenaran dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan feminisme liberal menganggap bahwa penyimpangan menjadi tujuan awal dari budaya dan tradisi *dowry* pada era modern menjadi pemahaman yang turun-menurun

Kata Kunci : *Mahar, Dowry Murder, Pemerintah India, Tradisi*

Abstarck

The phenomenon of violence against women is not an individual abnormality but due to the gap in rights and obligations as well as the roles of men and women caused by the patriarchal system. Society in India still lives under patriarchy, which means they always prioritize men's right over women. Women in modern society and traditional society are very vulnerable to violence both criminal in nature and originating from tradition. At present, India is in the first place as the most dangerous count for women because of its cultural practices, one of the well-known traditional India cultural practices is the dowry or dowry system. Namely where the bride in a wedding traditions in India will give a number of dowries to the groom. Dowry is likened to a symbol of immigrants because the bride will become a new family member in her husband's family.

This research was analysed using liberal feminism theory and gender theory in international relations. The concept of liberal feminism theory to explain that women and men are created equal, and have the same rights and opportunities. Which means, women choose freedom completely and individually. Where in the theory liberal feminism is the cause of women's oppression due to the lack of opportunity or education of women in groups or individuals. In this case, liberal feminism views in the case of dowry murder the act of human rights violations against women as intolerable, because the value of dowry culture is used as a truth in committing violence against women and considers that deviations occur as the original goal of dowry culture and traditions in the modern era into a descending understanding.

Keywords: *Dowry, Dowry Murder, Governments of India, Traditions*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja baik di tempat umum, di tempat kerja, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti suami, orang tua, saudara laki laki ataupun perempuan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan kelainan individu melainkan karena adanya kesenjangan hak dan kewajiban serta peran laki laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Masyarakat di India masih hidup di bawah patriarki, yang artinya mereka selalu mendahulukan hak-hak pria dibandingkan wanita. Banyak perempuan di India tidak dapat menikmati kehidupan modern seperti negara lain, dan kurang mendapat kesempatan untuk berpendidikan lebih tinggi ketimbang laki-laki, dan banyak aspek lain dalam kehidupan di India yang menomorduakan perempuan.

Praktik budaya tradisional India yang terkenal ini salah satunya adalah sistem *dowry* atau mahar. Yaitu dimana pihak pengantin perempuan dalam suatu tradisi pernikahan di India akan memberikan sejumlah *dowry* kepada pihak pengantin laki-laki. *Dowry* diibaratkan sebagai simbol pendatang karena pengantin perempuan akan menjadi anggota keluarga baru di keluarga suaminya. Permintaan *dowry* tidak kunjung terpenuhi mendorong terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan. Di India, banyak keluarga dari pengantin laki-laki yang meminta *dowry* dengan jumlah yang sangat besar hingga melampaui batas kemampuan dari keluarga perempuan sehingga dapat menggunakan *dowry* sebagai cara untuk menjadi kaya. Permintaan terhadap *dowry* ini dapat memicu kekerasan dan bahkan pembunuhan, terutama ketika keluarga dari pihak istri tidak mampu memenuhi keinginan pihak keluarga suami. Kekerasan yang dialami ini secara terus menerus dapat memicu istri untuk bunuh diri, bahkan istri dibunuh oleh suami dan keluarganya, tetapi banyak kasus pembunuhan seperti itu yang biasa di samarkan sebagai kasus bunuh diri kasus tewasnya perempuan akibat *dowry* dilaporkan telah terjadi sebanyak 6.787 pada tahun 2005 dan 8.093 pada tahun 2007 semakin meningkat hingga mencapai 7.634 pada tahun 2015. Rata-rata kematian diakibatkan, mas kawin atau *dowry deaths* pada tahun 2012-2016 adalah 8.005 kasus dan tahun 2017-2021 adalah 7.093 kasus pada periode yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative reseacrh*) dengan model deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis data yang dikumpulkan serta disusun dengan memperhatikan dan meneliti beberapa faktor yang berkaitan dengan fenomena dan kondisi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian adalah teknik analisis dokumen (*document analysis*) yang merupakan pencarian data dengan menggunakan sumber tertulis yang mencerminkan pemakaian bahasa sinkronis (Subroto, 1992). Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai bagaimana Upaya Pemerintah India Mengatasi Tradisi Dowry tahun 2015-2020.

Penulis juga menetapkan batasan penelitian tentang bagaimana mampu mengambil fokus pada dowry yang terus menerus memakan korban hingga 2020, dan bagaimana peran Pemerintah India dan penerapan CEDAW dalam mengatasi diskriminasi *Dowry* di India 2015-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara turun menurun. Kebiasaan tersebut dianggap baik dan dapat dijadikan ciri khas dari masyarakat yang melakukan kebiasaan tersebut. Tradisi dowry yang berkembang di banyak negara merupakan tradisi yang telah lama dilakukan. Salah satu negara yang menjalankannya adalah India. Di negara India mahar merupakan bagian penting dalam pernikahan. Dalam tradisi India pernikahan merupakan suatu upacara sacral karena dapat menyatukan dua keluarga berbeda sehingga pemberian mahar menjadi syarat penting pernikahan dapat dilaksanakan. Sistem *dowry* atau mahar adalah dimana pihak pengantin perempuan dalam suatu tradisi pernikahan di India akan memberikan sejumlah *dowry* kepada pihak pengantin laki-laki.

Dowry diibaratkan sebagai simbol pendatang karena pengantin perempuan akan menjadi anggota keluarga baru di keluarga suaminya. Sistem mahar di India mengacu pada barang tahan lama, uang tunai, dan *property* nyata atau bergerak yang diberikan keluarga pengantin wanita kepada pengantin pria, orang tuanya, dan kerabatnya sebagai syarat pernikahan. *Dowry* disebut *dahez* dalam bahasa Hindi dan sebagai *jahez* dalam Bahasa Urdu. *Dowry* dengan kata lain digunakan sebagai *financial security* atau simpanan bagi pengantin perempuan apabila terdapat kebutuhan mendadak yang di perlukan atau untuk anak-anaknya di masa depan. Selain itu *dowry* juga diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada pihak pengantin laki-laki. Pemberian dowry tidak boleh melalui paksaan dari pihak manapun.

Pada zaman ini yang sudah modern ini, tradisi pemberian mahar oleh keluarga mempelai perempuan masih dijalankan. Masih adanya tradisi di zaman sekarang semakin membuat yang memiliki anak perempuan menderita. Tuntutan mahar yang diminta oleh keluarga pihak laki-laki semakin besar karena tuntutan hidup yang semakin besar pula. Hal ini membuat keluarga yang memiliki anak perempuan harus bekerja lebih giat agar anak mereka dapat melangsungkan pernikahannya. Apabila keluarga perempuan belum dapat membayar lunas mahar yang diminta, mahar dapat dilunasi setelah pernikahan dilangsungkan, namun hal ini tetap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (keluarga perempuan dan keluarga laki-laki). Namun risikonya adalah mempelai perempuan tersebut akan mendapatkan perlakuan buruk dari keluarga suaminya. Para Istri yang belum lunas membayar mahar dijadikan sebagai pembantu, mereka sering juga mendapat perlakuan

kasar dari suaminya sendiri. Perlakuan ini dilakukan agar keluarga perempuan tersebut tidak lari dari tanggung jawab membayar mahar dan segala melunasinya. Kekejaman keluarga pria juga meningkat, mereka kadangkala menaikkan jumlah mahar dengan berbagai alasan sehingga keluarga perempuan dengan terpaksa harus memenuhi keinginan keluarga pria. Keluarga perempuan banyak rela menghabiskan harta benda mereka untuk memenuhi kewajiban mahar mereka, hal ini banyak didorong oleh ketakutan tidak dapat melihat sanak perempuan yang telah menikah dengan keluarga tersebut.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya budaya konsumerisme masyarakat India yang akhirnya menggunakan *dowry* sebagai suatu cara untuk naik ketangga kelas yang lebih tinggi, memperoleh jaminan ekonomi, mengumpulkan kekayaan dan nantinya bisa diputar untuk membayar *dowry* bagi adik atau anak perempuan mereka. Cara ini dilakukan dengan mengorbankan keluarga yang memiliki anak perempuan. Sistem mahar dapat menempatkan beban keuangan yang besar pada keluarga pengantin wanita. Dalam beberapa kasus, sistem mahar mengarah pada kejahatan terhadap perempuan, mulai dari pelecehan emosional dan cedera bahkan kematian. Pembayaran mahar sudah lama di larang berdasarkan Undang-undang India tertentu Bagian 304B DAN 498A1 KUHP India. Undang-undang Larangan *Dowry* 1961 mendefinisikan mahar. "*Dowry* berarti *property* atau kewanitaan berharga yang diberikan atau di setujui untuk diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh satu pihak dalam pernikahan dengan pihak lain dalam pernikahan, atau oleh orang tua dari salah satu pihak dalam pernikahan atau orang lain untuk salah satu pihak dalam pernikahan dengan oranglain

Penerapan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women's*) di India.

Salah satu konvensi HAM, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW merupakan suatu konvensi Internasional utama yang menjunjung tinggi hak asasi perempuan untuk bebas dari perlakuan diskriminasi. Pembukaan dari CEDAW menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan telah melanggar prinsip kesetaraan dalam menghormati perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perilaku diskriminasi terhadap perempuan telah mendorong terjadinya kasus kekerasan, terutama di dalam rumah tangga. Tujuan disetujuinya CEDAW adalah untuk melindungi dan mengenalkan hak-hak perempuan pada dunia Internasional, yang akhirnya disikapi oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB (UN Commission on the Status of Women) sebuah badan yang dibentuk tahun 1947 oleh PBB sebagai dewan pertimbangan serta penyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan posisi perempuan. Kasus-kasus

diskriminasi lebih banyak dijumpai di negara berkembang dibandingkan negara maju, dimana salah satu negara dengan angka diskriminasi perempuan yang tinggi adalah India. Salah satu faktor yang menyebabkan India menjadi negara dengan kasus ketidaksetaraan yang cukup tinggi adalah pengaruh sosial budaya yang mendukung bahwa laki-laki lebih memiliki power dari pada perempuan. Akibat tingginya tingkat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuannya, India ikut serta dalam mengurangi kasus-kasus diskriminasi perempuan

Perkembangan *Dowry* Setelah Meratifikasi CEDAW di India

India yang telah meratifikasi CEDAW tetap tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah internal atau pribadi suatu kelompok masyarakat manapun, kecuali diberi wewenang oleh kelompok tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan deklarasi pertamanya. Hampir keseluruhan masyarakat India tidak menginginkan adanya intervensi oleh pemerintah terkait dengan penyelesaian masalah-masalah pribadi. Pihak pengantin laki-laki bergantung pada dowry untuk meningkatkan status ekonominya karena, lebih mudah dalam mengumpulkan kekayaan materi. Dalam penerapannya, India telah mencoba untuk menggunakan seluruh instrumen yang ada di negaranya baik dari kebijakan, aturan, dan sanksi atau hukuman dan peningkatan kualitas hidup perempuan melalui program-programnya yang dibantu oleh organisasi Internasional. Akan tetapi, kebijakan dari pemerintah dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India kurang memberikan dampak yang signifikan dalam penerapannya, dilihat dari data-data angka kematian masih tergolong tinggi. Peratifikasian CEDAW ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang efektif untuk menangani masalah diskriminasi perempuan di India karena banyak factor yang menyebabkan masalah diskriminasi perempuan di India terus bertambah.

Dibawah perkembangan patriarki dan sistem ekonomi kapitalis, sistem *dowry* semakin banyak memakan korban, terutama perempuan. Perkembangan struktur ekonomi India yang telah di pengaruhi oleh sistem kapitalis turut memperkeruh dan memperparah dampak sistem *dowry* terhadap perempuan. lahirnya revolusi hijau di India menyebabkan perempuan tersingkir dari tanah pertanian dan mendapat upah lebih rendah dari laki-laki. Keadaan ini membuat perempuan semakin terhimpit oleh beban ekonomi. Sementara disisi lain karena tekanan adat dan budaya, perempuan juga harus menanggung kelangsungan hidup mereka.

Data menunjukan bahwa kasus *dowry* ditahun 2010-2015 korban angka *dowry* masih diangka 8000-an dan menurun ketika di tahun 2015 sekitar 7634, jika ditotalkan jumlah

korban jiwa akibat *dowry* sekitar 49.364, sedangkan korban ditahun 2016-2020 tergolong menurun dan jika dijumlahkan sekitar 36.361 korban jiwa. Dua puluh Wanita dibunuh oleh mahar setiap hari di India, antara 2017 -2021, total kematian 35.493 terjadi di India. Uttar Pradesh mencatat tertinggi (11.874) mahar kematian selama lima tahun terakhir diikuti oleh Bihar, Madhya Pradesh, Bengal, dan Rajasthan. Uttar Pradesh dan Bihar yang banyak memakan korban akibat *dowry* karena, menyumbang hamper setengah 48 persen dari total kematian akibat mahar. Kenapa di daerah Uttar Pradesh mencatat tertinggi kasus kematian akibat mahar dikarenakan Uttar Pradesh merupakan negara terpadat di bagian Utara di India, saat ini Uttar Pradesh terbagi menjadi 75 distrik,

Kebijakan Pemerintah India mengatasi *Dowry*

Pemerintah India telah melakukan berbagai cara untuk melindungi hak-hak perempuan di India, dengan didukung oleh organisasi Internasional dan aktivis-aktivis pejuang hak-hak perempuan di India dengan berlandaskan perspektif feminisme. Dimana pejuang feminisme mempertahankan kepercayaan mereka bahwa perempuan harus dilindungi serta memiliki kesetaraan dengan laki-laki (kesetaraan gender). Dari data-data yang diperoleh terkait kasus *dowry murder*, baik itu catatan kriminal maupun bunuh diri telah membuktikan bahwa kasus *dowry murder* yang menjadi akar dari seluruh tindakan kriminal pada perempuan di India, merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang terbaik dalam meminimalisir bahkan mengatasi kasus *dowry murder* sehingga dapat diterapkan secara efektif dan menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Peneliti menemukan bahwa upaya pemerintah India dalam mengatasi *dowry* dilakukan dalam berbagai jenis kebijakan yang menggambarkan untuk mengatasi tradisi *dowry* di India.

Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian juga ambil alih telah melakukan kebijakan. Program Cooperative and Assistance for Relief Everywhere (CARE) merupakan LSM internasional yang berfokus pada permasalahan kemanusiaan, terutama masalah-masalah yang dialami oleh kaum perempuan di dunia Internasional. Dalam hal ini CARE membantu pemerintah India mengatasi permasalahan Dowry murder yang terjadi di India. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan kepada perempuan-perempuan di India agar tidak terjerumus atau menjadi korban dari *dowry murder*, Program ini didukung untuk mengurangi angka jumlah kematian akibat mahar yaitu seperti, program kesehatan, program ekonomi, program pendidikan serta program advokasi dll. Yang dilakukan untuk perempuan-perempuan India agar terhindar dari diskriminasi akibat mahar.

Program Pendidikan

a. *Program Early Childhood Development (ECD)*

ECD (*Early Childhood Development*) merupakan salah satu program CARE yang berlokasi di Chhatisgarh. Program ini menjadi program inisiatif dari Pemerintah India yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi anak-anak untuk pendidikan pra-sekolah, kesehatan dan Imunisasi di Pusat Angwandi (AWCs). Masa pendidikan anak usia dini merupakan suatu tahap yang paling signifikan dalam tumbuh kembang seorang individu. Masa anak-anak berumur 0-6 tahun adalah masa yang tepat untuk memasukkan pendidikan dikarenakan mereka akan sangat cepat mencontohi perbuatan orang-orang yang berada di sekitarnya

b. *Program Adolescent Girls' Learning Centre (AGLC)*

Program ini merupakan salah satu program CARE yang dilaksanakan di daerah Kutch, Gujarat untuk menjamin kelanjutan pendidikan bagi anak-anak perempuan yang tidak pernah mendapat pendidikan dan putus sekolah. Program ini memperdayakan remaja perempuan melalui kegiatan belajar dari tingkat dasar, keterampilan membaca, berhitung, dan memberikan mereka keterampilan hidup untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka melalui pengenalan berbagai kegiatan-kegiatan yang dipenuhi dengan hal-hal seperti budaya dan olahraga yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan anak-anak perempuan. Tujuan dari keterampilan AGLCs ini adalah agar anak-anak perempuan dapat memiliki kemandirian ekonomi yang dapat dipergunakan dalam kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

c. *Program Udaan*

Udaan merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menjamin pendidikan bagi anak-anak perempuan yang berasal dari kelompok yang termajinalkan. Program CARE ini berlokasi di Uttar Pradesh, Bihar, Odisha dan Haryana. *Udaan* CARE International melalui CARE India dibantu oleh LSM Lokal telah melaksanakan program *Udaan* pada negara bagian Uttar Pradesh (Distrik Hardoi), Bihar (Distrik Madhubani), Odisha (Distrik Mayurbhanj) dan Haryana (Distrik Mewat dekat Delhi).

Program Kesehatan

a. *Madhya Pradesh Nutrition Project (MPNP)*

Program MPNP yang berlokasi Distrik Tikamgarh, Panna dan Chhatarpur di Madhya Pradesh bertujuan untuk mengentaskan permasalahan gizi buruk ditiga distrik di daerah

Bundelkhand dari Madhya Pradesh. Program MPNP ini menawarkan kesempatan untuk memberikan dukungan jangka panjang untuk pengembangan layanan anak terpadu pada negara bagian Madhya Pradesh.

b. *Mother and Child Health (MCH) Project*

Mother and Child Health merupakan salah satu proyek yang diimplementasikan CARE melalui kerjasama dengan media BBC di Odisha dan Madhya Pradesh. Odisha dan Madhya Pradesh merupakan dua daerah termiskin di India dan memiliki tingkat kesehatan ibu dan anak yang terburuk di India. Madhya Pradesh memiliki tingkat kematian bayi yang tertinggi di India yaitu 67% per 10.000 kelahiran, sedangkan Odisha sebesar 62% dari 100.000 kelahiran. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menurunkan angka kekurangan gizi pada bayi dan anak serta memperbaiki perilaku ibu ke arah yang lebih positif.

c. *Reproductive and Child Health Nutrition and Awareness*

Program ini didukung oleh *CAIRN India Limited* dan berlokasi di Rajasthan. Maksud dari program ini adalah untuk berkontribusi meningkatkan status kesehatan perempuan di kabupaten tersebut dengan memobilisasi masyarakat untuk kesehatan yang lebih baik. Fokus dari program ini adalah pengurangan angka kematian Ibu dan bayi, peningkatan kebersihan mengenai menstruasi dan kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan dan wanita. Program ini telah memperluas intervensi dengan memasukkan komponen-komponen kebersihan menstruasi di antara wanita dan gadis remaja melalui kegiatan kewirausahaan.

Program Advokasi

Program CARE (*Cooperative and Assistance for Relief Everywhere*) merupakan LSM internasional yang berfokus pada permasalahan kemanusiaan, terutama masalah-masalah yang dialami oleh kaum perempuan di dunia internasional. CARE memberikan program advokasi yang ditujukan pada masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial terkait perempuan dan kebijakan yang kurang berpihak kepada perempuan. Kegiatan ini dibentuk agar dapat mempengaruhi kawasan, negara, level nasional dan global dalam merefleksikan keadilan dan perhatian bagi kelompok-kelompok yang termajinalkan, masyarakat miskin, ketidakadilan sosial, dan juga permasalahan gender. Dalam menangani isu-isu permasalahan gender, CARE telah aktif bekerja dalam forum publik dan membantu mereka dalam mendapatkan hak-hak mereka

Program Ekonomi

a. The Women's Empowerment Principles (WEPS)

The Women's Empowerment Principles (WEPS) adalah seperangkat prinsip yang menawarkan panduan untuk bisnis tentang cara mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tempat kerja, pasar dan masyarakat. Tujuan dari program ini agar perempuan dapat mendapat keadilan serta perlakuan yang setara dengan laki-laki di tempat kerja. Hal-hal yang termasuk pada prinsip program ini adalah upah yang sama antara perempuan dan laki-laki, dan tidak memberikan toleransi terhadap pelaku pelecehan seksual di tempat kerja

b. Women Leadership in Small and Medium Enterprises (WLSME)

Women Leadership in Small and Medium Enterprises adalah program yang dimulai dari tanggal 28 September 2012 hingga 27 September 2015 ini dilaksanakan di distrik Cuddalore di Tamil Nadu, India. Program ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor penentu utama dari UKM yang dipimpin oleh perempuan yang berhasil dalam hal keuntungan yang di dapat.

c. Program The Ministry of Women and Child Development

India membentuk yang dulunya merupakan bagian dari *The Ministry of Human Resources Development* pada 30 Januari 2006. Tujuan utama dari *The Ministry of Women and Child Development* adalah memberdayakan para perempuan di India agar terbebas dari perlakuan diskriminatif, menyadarkan para perempuan akan hak-hak yang dimilikinya dan memberdayakan perempuan secara sosial dan ekonomi. *The Ministry of Women and Child Development* memiliki program yang mendukung tujuan utamanya, yang mana salah satunya yaitu *Swadhar Greh Scheme*. Perempuan yang datang ke *Swadhar Greheither*, baik itu sendiri Bersama dengan pihak lain maka akan diwawancarai terlebih dahulu oleh konselor sesuai dengan protokol dari *The Ministry of Women and Child Development*.

Wawancara ini bertujuan untuk menentukan jenis layanan apa yang diberikan terhadap pelapor sehingga dapat mengurangi trauma yang dimilikinya. Pelaporan apabila ternyata menderita trauma yang tidak biasa diatasi oleh layanan yang terdapat *Swadhar Greh Scheme*, maka akan dirujuk ke LSM lainnya yang dinilai mampu. Hasil wawancara ini dibuat dalam bentuk dokumen yang nantinya akan diperiksa ulang oleh *The Ministry of Women and Child Development* dengan kepolisian setempat. Pembiayaan *Swadhar Greh Scheme* sepenuhnya ditanggung oleh *The Ministry of Women and Child Development* bersama dengan masing-masing negara bagian.

Faktor Penyebab *Dowry*

Meningkatnya jumlah angka kematian dowry setiap tahunnya tentunya ada yang mendasari tradisi tersebut tetap bertahan di India, walaupun pemerintah India juga sudah membuat beberapa kebijakan dan program untuk mengatasi tersebut tetapi, tetap saja sangat susah melepaskan tradisi mahar yang mengakibatkan banyak korban terjadi antara lain

1. Faktor Ekonomi

Ada banyak faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap sistem mahar. beberapa diantaranya adalah sistem pewarisan dan status ekonomi pengantin wanita. Beberapa saran faktor ekonomi dan lemahnya institusi hukum tentang warisan menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, dengan warisan tersebut hanya diserahkan kepada anak laki-laki. Hal ini membuat perempuan bergantung pada suami dan mertuanya, yang menyimpan mahar pada saat menikah. Sebelum tahun 1956, termasuk selama Raj Inggris, anak perempuan tidak memiliki hak waris atas kekayaan keluarga mereka. Pada tahun 1956, India memberikan status hukum yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki diantara keluarga Hindu, Sikh dan Jain, dibawah Undang-undang Suksesi Hindu (India memberikan penduduk Muslimnya hukum status pribadi yang berasal dari Syariah).

Terlepas dari hukum waris yang baru, mahar terus berlanjut sebagai proses dimana harta orang tua dibagikan kepada anak perempuan pada pernikahannya melalui proses sosial, bukan setelah kematian orang tua melalui proses yang diawasi pengadilan secara perlahan dibawah undang-undang Suksesi Hindu (1956).

Memberi mahar, setidaknya secara teori ialah jaminan ekonomi dan keuangan perempuan dalam pernikahan mereka dalam bentuk barang bergerak. Ini membantu mencegah kehancuran kekayaan keluarga dan memberikan keamanan kepada pengantin wanita pada saat yang bersamaan. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai warisan pra kematian, karena begitu seorang wanita diberikan hadiah bergerak, dia mungkin terputus dari harta keluarga. Bagi banyak orang, mahar telah menjadi beban keuangan yang lebih besar keluarga, dan dapat membuat keluarga melarat karena tuntutan dari mempelai pria.

2. Faktor Sosial

Struktur dan kekerabatan pernikahan di beberapa bagian India berkontribusi pada mahar. Di Utara, pernikahan biasanya mengikuti sistem *patrilocal* (tinggal dengan keluarga suami). Dimana pengantin wanita adalah anggota keluarga yang tidak terkait. Sistem ini

mendorong mahar mungkin karena pengecualian keluarga pengantin wanita setelah menikah sebagai bentuk warisan premortem untuk pengantin wanita. Di selatan, pernikahan lebih sering dilakukan dalam keluarga pengantin wanita, misalnya dengan kerabat dekat atau sepupu silang, dan dalam jarak fisik yang lebih dekat dengan keluarganya. Selain itu, pengantin wanita mungkin memiliki kemampuan untuk mewarisi tanah, yang membuatnya lebih berharga dalam pernikahan, mengurangi kemungkinan mahar di atas harga pengantin wanita.

Selain kebiasaan pernikahan yang dapat mempengaruhi mahar, kebiasaan sosial atau ritual, dan harapan orang tua terhadap *dowry* adalah faktor penting untuk dipertimbangkan. Sebuah studi tahun 1995 menunjukkan bahwa sementara sikap orang berubah tentang mahar, mahar terus menang, dalam studi tahun 1980 yang dilakukan Rao, 15 siswa menjawab bahwa mahar tidak penting untuk menikah, tetapi 40% orang tua mereka kemungkinan mengharapkan mahar. Sementara India telah membuat kemajuan untuk hak-hak perempuan terus berada dalam status bawahan dalam keluarga mereka. Pendidikan, pendapatan, dan kesehatan wanita adalah beberapa faktor signifikan yang berperan dalam sistem mahar, dan untuk seberapa besar kendali yang dimiliki seseorang wanita atas pernikahannya

3. Faktor Agama

Mahar di India tidak terbatas pada agama tertentu, ini tersebar luas di kalangan umat Hindu dan agama lain. Misalnya, Muslim India menyebut mahar sebagai *jahez*, keadilan praktik dalam hal *jahez -e- fatimi*. Islam mengklasifikasikan *Jahez* menjadi dua kategori : yang pertama terdiri dari beberapa artikel penting untuk pakaian pengantin wanita serta untuk kehidupan suami-istri. Yang lainnya terdiri dari barang-barang berharga, pakaian, perhiasan sejumlah uang untuk keluarga pengantin pria, yang diselesaikan setelah tawar menawar. *Jahez* sering jauh melebihi biaya baraat dan pesta pernikahan. *Jahez* terpisah dari pembayaran tunai sebagai *Mahr* atau mahar yang diwajibkan oleh hukum agama syariah.

Institusi Hukum Terhadap Larangan Dowry

Sejak masa kemerdekaan India, sejumlah undang-undang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan bagi kaum perempuan. Undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kaum perempuan itu banyak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah India jauh sebelum pemerintah India meratifikasi CEDAW. Untuk penanganan kekerasan langsung terkait mahar yang meliputi penganiayaan dan pembunuhan terhadap mempelai wanita, pemerintah India telah mengeluarkan berbagai regulasi. Adapun hukum-hukum

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah India untuk melarang *dowry* serta, amandemen hukum-hukum tersebut antara lain:

The Dowry Prohibition Act 1961

Hukum nasional pertama undang-undang larangan mahar/*dowry* 1961. Undang-undang yang membuat negosiasi mahar illegal dikenakan hukuman penjara dan denda. Namun dalam hal ini, masih ada celah keluarga dapat memberikan "hadiah" kepada mereka pengantin pada saat pernikahan dan yang tidak "berlebihan" dalam hal finansial. Catatan hadiah harus dipertahankan dan hadiah harus dipercaya untuk pengantin.

The dowry Prohibition Amandement Act 1984

Dowry prohibition act ini sendiri di amandemen pada tahun 1984,1985,dan 1986. Undang-undang ini memberikan legitimasi untuk menghukum pelaku yang memberi dan atau menerima mahar dalam jumlah besar. Bila bercerai, mahar harus dikembalikan. Untuk pelaku *dowry deaths* sendiri, dalam bagian 304B tahun 1986 ditetapkan hukuman tidak kurang dari 7 tahun penjara bila terbukti membunuh istri karena mahar.

The Criminal Law Act of 1983

The criminal law act of 1983 ini adalah undang-undang hukum pidana tahun 1983 mendefinisikan "kekejaman" yang mana pelanggaran dibawah Indian Penal Code bagian 498-A. bagaiman suami atau saudara perempuan yang dilecehkan atau yang menjadi sasaran perbuatan kejam yang berkaitan dengan tuntutan harta dianggap pelanggaran yang dapat dihukum.

Pasal 498A yang berbunyi:

"Suami atau saudara suami yang melakukan kekejaman terhadap istrinya akan dipidana dengan pidana penjara selama tiga tahun dan dapat diperpanjang hukumannya. Kekejaman disini berarti setiap perilaku yang sengaja cenderung mendorong wanita untuk bunuh diri atau menyebabkan cedera serius atau bahaya bagi kehidupan, anggota badan atau kesehatan (baik mental atau fisik) dari Wanita atau pelecehan Wanita di mana pelecehan tersebut dengan maksud untuk memaksa dia atau orang yang terkait dengannya untuk memenuhi setiap permintaan yang melanggar hukum karena tidak terpenuhinya permintaan yang dimaksud".

The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

Undang-undang tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan ini disetujui oleh Parliament of India pada 13 September 2005 dan baru berjalan secara efektif pada 26 Oktober 2006. PW DFA 2005 memiliki cakupan yang luas terhadap apa yang masuk ke dalam kriteria domestic violence terhadap perempuan selain kekerasan fisik. Domestic violence PW DFA 2005 meliputi kekerasan verbal, seksual hingga ekonomi. Peraturan ini bersifat preventif yang dibentuk sebagai upaya India dalam melindungi perempuan.

Menurut section 3 yang terdapat dalam PW DFA 2005, *domestic violence* dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan, baik itu tidak disengaja maupun dipaksa oleh pihak lain, apabila:

1. Dinilai mengancam atau melukai atau membahayakan pengantin perempuan maupun pihak yang terkait dengannya dari segi Kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), kehidupan (*life*), anggota tubuh (*limb*), kenyamanan (*well-being*), baik yang dilakukan secara fisik maupun mental sehingga mengakibatkan kekerasan fisik, verbal, seksual dan ekonomi.
2. Dinilai mengancam atau melecehkan atau melukai atau membahayakan pengantin perempuan atau pihak yang terkait dengannya demi memenuhi permintaan *dowry*.

Berdasarkan definisi tersebut, India secara eksplisit merincikan kategori *domestic violence* bagi perempuan. PW DFA 2005 memiliki tujuan utama yaitu melindungi pengantin perempuan dari adanya Tindakan domestic violence yang berasal dari pengantin laki-laki. Domestic violence dalam PW DFA 2005 menyebutkan dowry sebagai permasalahan utama dalam kekerasan terhadap perempuan di India. Dengan demikian, PW DFA 2005 diharapkan dapat menjadi instrument untuk membantu India dalam mengatasi dowry death. CEDAW committee sendiri mengatakan pembentukan PW DFA merupakan Langkah yang tepat bagi India dalam memperjuangkan dan menjamin hak para perempuan di negaranya

Sebagai negara multikultural, India memiliki berbagai macam hukum. selain hukum nasional, ada pula hukum yang didasarkan pada adat, agama dan kebiasaan. Setiap kelompok memiliki aturannya sendiri. Hukum yang terdapat pada agama Hindu misalnya , *Hindu Marriage Act 1965*, *Hindu Succession Act 1956*, *Hindu Guardianship and Minority Act 1956*, dan *Hindu Adoption and Maintenance Act 1956*.

Hukum yang biasa didasarkan pada adat dan kebiasaan seringkali menempatkan wanita dalam posisi yang lebih rendah. Terhadap hukum yang seringkali didasarkan pada

budaya, adat atau kebiasaan. Mahkamah Agung India berapa kali merujuk pada konvensi Internasional dan hak asasi manusia, misalnya CEDAW, sehingga apabila terjadi pertentangan hukum, hukum adat dan kebiasaan tersebut bisa dipatahkan kedudukannya dalam pengadilan

SIMPULAN

Pemerintah India sebenarnya telah melakukan berbagai kebijakan, baik secara langsung terkait mahar maupun tidak. Pemerintah telah melarang dalam beberapa aturan, yakni *Dowry Prohibition Act*, *Indian Penal Code*, dan *The Protection of Women from Domestic Violence Act* dan amandemen terhadap hukum adat seperti aturan-aturan Hindu yang dianggap diskriminatif dan merugikan wanita. Dowry sendiri sudah dianggap ilegal dan oleh karenanya penerima seperti mahar diancam dengan hukuman penjara dan denda. Disamping itu, bila terbukti bersalah membunuh istri karena menuntut mahar (dowry deaths), pelakunya diancam dengan hukuman tak kurang dari 7 tahun penjara.

Dalam implementasinya, India sebenarnya telah menggunakan hampir seluruh instrument kebijakan publik, baik aturan, sanksi dan hukuman, bujukan, peningkatan kapasitas melalui Pendidikan dan sebagainya. Namun, kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah *dowry deaths* ini ternyata kurang efektif terutama dalam penerapannya, terutama dengan jumlah korban dari tahun ke tahun tidak berubah signifikan. Di institusi kepolisian dan kehakiman sendiri sebagai garis depan dalam penegakan hukum, kurang bisa menerapkan hukum yang sudah ada dan kurang berpihak pada wanita sebagai korban, karena patriarki juga ada dalam institusi hukum. Celah- celah dalam aturan yang dikeluarkan pun secara seperti memperbolehkan hadiah sebagai pengganti mahar, serta ketatnya aturan teknis untuk pembuktian pelaku kejahatan dowry deaths yang kadang menjadi bumerang dalam implementasi aturan-aturan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Chayes, A. H. C., 1998. *The New Sovereignty: Compliance With International Regulatory Agreements*. 1st ed. Cambridge: Harvard University Press.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan alternatif pemecahannya*, P.T Alumni, Jakarta, 2000
- Achmad Irwan Hamzani, "Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)," *Sosekhum Universitas Pancasakti Tegal* Vol. 6 No. 9 (2010): 7.

- Biswas, Praggnaparamita. "Politics of Dowry Deaths in India: A Study of Dina Mehta's Brides are Not For Burning". Eds. Vishwanath Bite dan Madhuri Bite. *The Criterion* 4.II (April 2013). <http://www.the-criterion.com> (diakses 14 Januari 2023)
- Dalmia Sonia, Lawrence Pareena G, *The Institution of Dowry in India: Why It Continues to Prevail*, *The Journal of Developing Areas*, 38(2), pp. 71-93. 2005
- Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan Dan Kestaraan Gender," *Muwazah* 3 No. 1 (2011)
- Hapels,N,& Suryasarn,B.(2005). Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak
- India now sees fewer murders and dowry deaths what does it, New Delhi: 2022
- John W. Craswell. "Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches".4 Edition, Sage : London.2014. Hal. 32
- Lapian L.M.Gandhi Lapian, Disiplin Hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, Yayasan Pustaka Obir Indonesia, Jakarta,2012.
- Lisa Cahyanida Siswanto.Kegagalan Penerapan Prinsip *CEDAW* oleh India dalam Menangani Kasus *Dowry Death*,<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> (diakses 05 Januari 2022)
- Manchandia, P., 2005. Practical Steps towards Eliminating Dowry and Bride-Burning in India. *Tulane Journal of International and Comparative Law*, Volume 13, pp. 305-319.
- Mohtar Mas'ood. " Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi " LP3ES : Jakarta, 1990. Hal. 223
- Muhammad Idrus, " Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Erlangga: Jakarta. 2009. Hal 23
- National Crime Records Bureau, India Today-2022, New Delhi : National Crime Records Bureau,
- National Crime Records Bureau. Crime in India-2007. New Delhi: National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India; 2008
- Ranteallo. Dowry Murder :Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan di India.1 st ed, P.T.K.R.d.I.C, Universitas Udayana, Bali, 2012
- Rastogi Mudita, Paul Therly,*Dowry and Its Link to Violence Against Women in India: Feminist Psychological Perspectives*.*Trauma Violence Abuse*, 7(1), pp. 66-77,2006.
- Reuters, 2018. The World's Most Dangerous Countries for Women. [Online] Available at: <https://poll2018.trust.org/> (Diakses 23 Desember 2022)
- Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, hal. 144

- Tambiah, S.J. (1973). Dowry and bride wealth, and the property rights of women in south Asia. In M. Fortes, J.R. Goody, E.R. Leach, & S. J. Tambiah (Eds.), *Bride wealth and dowry* (Vol. 7, pp. 59–169). Cambridge, England: Cambridge University Press.
- UN Women, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), hlm. 1, <http://www.unwomen-eseasia.org/projects/Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf> (diakses pada 13 Januari 2023)
- UNCT 2017. Joint Submission of India UN Country Team UNCT for The Universal Periodic Review Of India, 3rd Cycle, Bangkok : United Nation Human Rights Council